Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Vol.3, No.4 Oktober 2024
e-ISSN: 2962-0813; p-ISSN: 2964-5328, Hal 15-27
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.2894
Available Online at: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Mutiara Ratu Shapura, Nurlaila, Nurul Jannah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
Koresprodensi Penulis: mutiararatushapura@gmail.com

Abstract*. Management of village fund management is accountability or answering and explaining the performance and actions of a person/leader of an organizational unit to parties who have rights or who are authorized to ask for accountability in the form of reports with the principle that every village financial management activity must be accountable to the village community. Research methods used The quantitative method used was a sample size of 34 people. The data collection instrument used was a questionnaire. The dependent variable of this research is village fund budget management and the independent variables are understanding the accounting system, use of information technology and internal control. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of the t test show that (1) the variable understanding the accounting system has no effect on village fund budget management, the use of information technology has an effect on village fund budget management, internal control has a positive effect on village fund budget management while simultaneously the variables understanding the accounting system, use of information technology and internal control has a significant and positive effect on village fund budget management.*

Keywords*: accounting system, information technology, internal control, village budget*

Abstrak. Pengelolaan pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang meiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desaMetode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 34 orang. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Variabel terikat penelitian ini adalah pengeloilaan anggaran dana desa dan variabel bebasnya pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil uji t menunjukkan bahwa (1) variabel pemahaman sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana desa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana desa , pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran dana desa sedangkan secara simultan variabel pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan anggaran dana desa.

Kata Kunci : sistem akuntansi, teknologi informasi, pengendalian internal**,** anggaran dana desa

1. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas

Received Mei 29, 2024; Revised Juni 12, 2024; Accepted Juli 05, 2024; Online Available Juli 08, 2024
* *Mutiara Ratu Shapura, mutiararatushapura@gmail.com*

diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya di perlukan adanya laporan pertanggung jawaban dari desa. Seperti yang di maksud dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan desa. Salah satu penerimaan Desa yang berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarkat adalah Alokasi Dana Desa atau di sebut dengan ADD. (Suhaida, 2018)

Bila mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan ke masing-masing Desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah Desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di Desa masing-masing.

Pengelolaan dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta di pertanggungjawabkan. Seperti halnya di desa Lawe Kihing. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Lawe Kihing adalah belum adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan sumber pendapatan masyarakat dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

Secara umum pemerintah desa masih belum bisa mengalokasikan dana Desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (ADD). Kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa terkait pengelolaan dana Desa masih belum mampu mengelola dana tersebut. Pengetahuan akan mengelola dana desa bahkan membuat laporan keuangan masih sangat minim sehingga yang dikhawatirkan adanya sebuah *asymmetryinformation* yang terjadi atas laporan keuangan dipublikasikan kepada publik. Pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa membutuhkan keterbukaan akses informasi yang diperoleh publik baik informasi pengelolaan dana desa dan informasi laporan keuangan karena keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan publik.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa terdapat hasil yang berbeda-beda, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Liani (2020) menunjukan faktor Kompetensi Aparatur Desa secara signifikan tidak mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor Sistem Pengendalian Internal secara signifikan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian dari Anwar (2019) menunjukan bahwa: 1) Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Komitmen Organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Putri Asmini(2020) menunjukan Perangkat Desa cukup berperan positif dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penulis dan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek dan tahun penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara dengan memfokuskan pada pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap anggaran dana desa. Karena ketiga variabel tersebut digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategis dan tujuan-tujuan yang telah di rencanakan dan disepakati oleh organisasi pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal yaitu efektif dan efisien dan persamaan nya terletak pada variabel dependen yang sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini antara lain, untuk mengetahui pemahaman sistem akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa, untuk mengetahui pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa, untuk mengetahui pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa, untuk mengetahui pemahaman sistem akuntansi, pemahaman teknologi dan informasi, dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Pengelolaan pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang meiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban berupa laporan dengan

prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undanagn dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaanya.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

a. Pemerintah pusat
b. Pemerintah daerah.
c. Masing masing kementrian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
d. Suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat daerah atau organisasi lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dana desa adalah keseluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjwaban keuangan desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan dana desa meliputi 5 tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

B. Pemahaman Sistem Akuntansi

Paham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara pembuatan memahami atau memahamkan. Dari pengertian ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang memiliki kepandaian dan mengerti benar tentang proses akuntansi dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang benar dan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang di terapkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi keuangan. (Powerdarmawinta, 2018) Adapun proses atau siklus akuntansi keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:

a. Transaksi
b. Analisis Bukti Transaksi
c. Mengelompokkan dan Pengikhtisarkan
d. Penerbitan Laporan dan Catatannya

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah indikator dari pemahaman akuntansi adalah: Tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi dan Tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan.

C. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan adalah turunan kata dari "Manfaat", yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan: pemanfaatan sumber alam untuk pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan pemanfaatan merupakan menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai komputer sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pemanfaatan bisa diartikan aktivitas menggunakan proses sumber dan untuk belajar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM di Indonesia yaitu:

1) Pendidikan Pemilik/Manajer
2) Skala usaha
3) Masa memimpin perusahaan
4) Umur perusahaan
5) Pelatihan akuntansi yang diikuti pemilik atau manajer (Yetty, 2020)

D. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah sejumlah prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam pengendalian internal Kerangka COSO (Commitee of Sponsoring Organization of Treadway Commision) terdapat beberapa prinsip pengendalian internal dalam komponen pengendalian internal (Sedarmayanti, 2017), a) Lingkungan Pengendalian, b) Penilaian Risiko, c) Aktivitas Pengendalian, d) Informasi dan Komunikasi, dan e) Pemantauan Pengendalian Internal.

Selang waktu yang penjang penelitian mengenai Pengaruh Sistem Informasi telah dilakukan dengan fokus yang beragam, Ginanjar Suendro (2018), judul Pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Demak). Masri Ayu Ndruru, Eduar Baene (2022), judul Sistem Akuntansi

Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan). Mada, dkk (2017), judul Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, & Partisipasi Masyaralat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Muhammad Fadil (2020), judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal). Muhamad Ali Riduan (2021), judul Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang). Karyadi (2018), judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan keuangan Desa (Studi Di Kecamatan Aikmel Dan Kecamtan Lenek Tahun 2018)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara. Dilakukan pada bulan September 2023 sampai dengan Desember 2023. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Pendekatan Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator. (Rahmani, 2016)

Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesra, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan dan kepala dusun di Kecamatan bambel Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 14 desa.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penyebaran kuisioner. Para perangkat desa diminta untuk mengisi pertanyaan yang ada di dalam lembar kuisioner. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini untuk variable pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal menggunakan kuisioner dari (budiyanto, 2014). Sedangkan variable penggunaan informasi akuntansi menggunakan kuisioner dari (aufar, 2013). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Teknik random sampling melibatkan pemilihan pemilihan sampel dari kerangka sampel menggunakan computer atau table acak.

Untuk mengolah data-data yang diperoleh dalam penelitian ini penguji menggunakan aplikasi SPSS 2.0 sebagai alat analisis data. (Rahmani, 2016)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara

Pemahaman sistem akuntansi mempunyai nilai signifikan 0.938 > 0.05 dan nilai t_{hitung} - 0.079 < 2.042 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan anggaran dana desa, maka dapat disumpulkan bahwa H_o diterima dan H_a ditolak.

Pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan dana desa di indentifikasikan sebagai salah satu penentu pemenuhan hak kewenangan masyarakat desa. semakin tinggi tingkat pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan dana desa juga akan semakin baik. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang desa yaitu UU No. 6 tahun 2014 dimana perangkat desa harus dapat memahami pengelolaan dana desa. penelitian yang dilakukan oleh surya dailiati dan sudariyanto juga menyatakan bahwa pemahaman memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. (Sudariyanto, 2018).

Selain itu, berdasarkan tanggapan responden terhadap hasil penyebaran kuesioner, rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat rendah atas variabel pemahaman sistem akuntansi. Hal itu berarti rata-rata pegawai memberikan penilaian yang rendah atau cenderung tidak setuju dengan variabel pemahaman sistem akuntansi. Tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai; dan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Oleh karena itu, dapat diindikasikan bahwa semakin baik para pegawai dalam memahami sistem akuntansi pada organisasi, maka akan semakin baik penerapan akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana bagi desa, namun tidak dengan halnya dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan pemahaman sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana desa yang artinya tinggi atau rendahnya pemahaman pegawai tentang akuntansi tidak mempengaruhi pengelolaan anggaran dana desa tersebut.

Hal itu berarti semakin baik sistem informasi akuntansi yang pada dasarnya lebih bersifat finansial dan mengacu pada pemrosesan transaksi organisasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk membuat keputusan teknis dan nonteknis, maka semakin baik kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjelaskan kinerja, tindakan dan keputusan seseorang atau organisasi kepada pihak yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut.

Paham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara pembuatan memahami atau memahamkan. Dari pengertian ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang memiliki kepandaian dan mengerti benar tentang proses akuntansi dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang benar dan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang di terapkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi keuangan. (Powerdarmawinta, 2018)

B. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai signifikan 0.048 < 0.05 dan nilai t_{hitung} 2.644 > 2.042 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran dana desa, maka dapat disumpulkan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima sehingga variabel pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran dana desa.

Dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintah daerah, perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas harian aparatur pemerintah secara optimal, akurat dan tepat waktu.Salah satu nya adalah membuat laporan keuangan yang diisi dengan informasi-informasi keuangan yang akurat yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pemanfaatan adalah turunan kata dari "Manfaat", yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukan kegiatan menerima.

Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan: pemanfaatan sumber alam untuk pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan pemanfaatan merupakan menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai komputer sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pemanfaatan bisa diartikan aktivitas menggunakan proses sumber dan untuk belajar.

Selanjutnya Teknologi Informasi (TI) dilihat dari penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Kata Teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan

sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi". (Tangkaroro, 2017)

Teknologi informasi sangat pesat berkembang dan dampaknya telah kita rasakan, seperti kemudahan untuk memperoleh informasi melalui telpon saluler dan internet. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomuniksi (Kadir dan Triwahyuni, 2:2013). (Santoso, 2016) melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran dana daerah.

C. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara

Pengendalian Internal mempunyai nilai signifikan 0.032 < 0.05 dan nilai t_{hitung} 3.076 > 2.042, maka dapat disumpulkan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima sehingga variabel pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran dana desa.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang–undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (Krismiaji, 2017)

(Santoso, 2016) melakukan penelitian di kabupaten Lampung Timur menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif tidak signifikan tehadap pengelolaan

anggaran dana. Widiyatama, dkk (2017) melakukan penelitian di kabupaten Sigi menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif tehadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini menegaskan bahwa sistem pengendalian intern sangatlah penting di terapkan dalam suatu organisasi, terlebih-lebih pada organisasi sektor publik. Baik pada instansi pemerintah ataupun non pemrintah.

D. **Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diketahui dari uji simultan (Uji F) didapat 0,009 < 0,05 dan nilai F_{hitung} adalah 4.366 > F_{tabel} 2.269, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap pengelolaan anggaran dana desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara.

Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan menyatakan bahwa ada pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara. Dan pada tabel R Square menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal sebesar 22,2%, sedangkan sisanya di jelaskan oleh variabel lain sebesar 78,8% yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah variabel pengendalian internal. sistem pengendalian intern sangatlah penting di terapkan dalam suatu organisasi, terlebih-lebih pada organisasi sektor publik. Baik pada instansi pemerintah ataupun non pemrintah

pengendalian internal adalah sejumlah prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins 2015). Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang: kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: a). Pemahaman sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara. b). Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran dana desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara. c.) Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran dana desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara. d). Pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan anggaran dana desa Lawe Kihing Kec. Bambel Kabupaten Aceh Tenggara.

DAFTAR REFERENSI

Agus Tri Basuki, Nano Prawoto.2016. Analisis Regresi Dalam penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews. Jakarta: Rajawali Pers

Ahmadi Bi Rahmani, Nur. 2016. Metode Penelitian Ekonomi. Febi UINSU Press edisi pertama

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putera, 1989), Q.S. Al-baqarah (2):282.

Andrianto. 2017. Transparasi dan akuntabilitas publik melalui egovernmen. Malang: Bayumedia Publishing

Duwi, Priyatno. 2017. Spss 22: Pengolahan Data Terpraktis. Yogyakarta : C.V Andi Offset

Ghazali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Di Ponogoro

Ghozali, Imam. 2017. Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program SPSS. Semarang: Badan

Ghozali, Imam.2016. Apakah Analisis Multivariate Dengan Program (Edisi Ketujuh), (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hanifah, Indah Suci. 2016. Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dalam e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi

Hartadi, Bambang .2018. Auditing: Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pendahuluan Edisi 1. Yogyakarta: BPFE

Harahap, Muhammad Ikhsan dan Rahmat Daim Harahap, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aset BPRS*" (At-Tijaraoh: Jurnal Ilmu Menejemen Dan Bisnis Islam) Volume 5, Nomor 1 Ed. Jan-Juni 2019

Ilhamy, Muhammad Lathief Nasution. 2018. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Febi Press

Imsar. 2018. "*Analisis Pengembangan Usaha Ucok Durian Medan* ",.Jurnal Laporan Penelitian (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU)

Kamilah, A. I. L. N. (t.t.). *Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan Dan Distribusi Pendapatan Di Kota Medan*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *6*(1).

Kamilah, K., Syarbaini, A. M. M. B., & Yafiz, M. (Jurnal, 2022). Jula-Jula: Accounting And Economic Practices In The Muslim Community Of North Sumatera. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Krismiaji. 2019 Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UnitPenerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Krismiaji.2016. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UnitPenerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Larony Tangkaroro, Kenny. 2015. Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa,

Larony Tangkaroro, Kenny.2017. Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa

Mahayani, Sulindawati dan Dewi. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana). E Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 8 Nomor 2

Mangkunegara.2016. Evaluasi Kinerja SDM . Jakarta: Prenada Media Group

Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI OFFSET

MIP. Nasution, N. Nurbaiti, N. Nurlaila, T. I. Rahma, and K. Kamilah, "Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic," 2020 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE), 2020.

Nur, Muhammad Aziz dan Sawitri Dwi Prastiti.2019.BFaktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 6 No. 2 Tahun 2019 Penerbit Universitas Diponegoro

Nurlaila. 2022. Pengaruh Sistem Pencatatan Laporan Keuangan Terhadap Optimalisasi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan. Sibatik Jurnal. Vol. 1 No. 5.

Poerwadarminta. 2016. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Perwakilan Nasional Edisi Ketiga: Balai Pustaka

Praptiningsih dan Fitri Yetty. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan Desa. Jurnal Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Vol. 5 No 1

Sedarmayanti. 2017. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju

Shuida, Nyoman. 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

Siyoto, Sandu. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Sugiyono. 2017. Metodologi Penelitian Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes). Bandung: Alfabeta

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Tri Basuki, Agus Nano Prawoto. 2016. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews Jakarta: Rajawali Pers

Yamin, Sofyan dan Heri Kurniawan. 2019. SPSS Complete Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS. Jakarta : Salemba Infotek

Yuliani, Safrida Nadirsyah dan Usman Bakar. 2020. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Banda Aceh). Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2

Yususf, Muhammad. 2020. Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk . Tesis Publikasi-Universitas Bina Utama. Jakarta